

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pada lapisan dokmatik hukum pengaturan pengaturan desentralisasi pendidikan yang diserahkan kepada daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan dikaji berdasarkan kepada segi prespektif fungsi dan juga tujuan pendidikan telah jelas terlihat bahwa pendidikan di Indonesia berupaya untuk menciptakan bangsa yang cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan serta memiliki pengetahuan yang baik dan wawasan kebangsaan yang luas seperti yang tertuang dalam sila pertama. Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat melakukan transformasi budaya, menciptakan tenaga kerja, menciptakan alat control sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian perkembangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan kelima fungsi dan tujuan pendidikan bagi masyarakat tentunya masyarakat akan sangat diuntungkan dalam hal birokrasi, sosial dan ketenagakerjaannya. Selain masyarakat, pemerintahpun juga merasakan dampak positif dari adanya kegiatan pendidikan. Di mana pendidikan dijadikan wadah atau tempat untuk menciptakan generasi yang ahli dan terampil dalam bidang masing-masing. Melalui pendidikan tersebut pemerintah akan lebih mudah dalam hal mananggulangi kejahatan sosial, pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan, karena pendidika tidak hanya berpaku

pada transformasi sikap dan budaya semata, melainkan pendidikan juga menciptakan tenaga-tenaga ahli di bidang ekonomi.

2. Pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah yang telah diimplementasikan sejak tahun 2001 merupakan momentum yang sangat tepat untuk mereformasi penyelenggaraan pendidikan dan aspek birokrasi, pendanaan, dan manajemen pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan, organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah. Hal tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang dengan tegas memberi kewenangan otonomi pendidikan langsung kepada setiap satuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Mutu atau kualitas dan relevansi pendidikan ada pada setiap proses pentahapan di satuan pendidikan. Komitmen Pemerintah untuk berinvestasi pada pendidikan sebagai solusi masa depan bangsa harus segera diwujudkan sepenuhnya melalui pengalokasian 20% APBN untuk pendidikan di luar anggaran pendidikan kedisiplinan dan gaji guru. Untuk lebih memperkuat dukungan pengembangan pendidikan sangat diperlukan kemitraan yang erat antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Akses dan ekuitas pada pendidikan yang berkualitas, terutama

pendidikan dasar dan menengah, harus terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka pendidikan unggulan bertaraf internasional perlu dikembangkan, dimonitor, dan dievaluasi secara bertahap dan berkesinambungan di setiap daerah dengan menekankan relevansi dengan kebutuhan, ciri khas daerah, keunggulan lokal serta dapat menampung putra daerah dengan berbagai tingkatan ekonomi (sosial ekonomi status).

3. Wujud desentralisasi pendidikan yang diserahkan kepada daerah sebagai upaya pemerintah daerah membangun karakter bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Perwujudan desentralisasi pendidikan mengandung konsekuensi pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Setiap orang berpendidikan tentu akan memiliki nilai tambah dibanding dengan orang yang belum berpendidikan. Setiap negara di dunia berusaha sekuat tenaga untuk selalu melakukan *continous Improvement* dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan semua negara meyakini kunci sukses meraih masa depan adalah sukses di dunia pendidikan.

Secara prinsip desentralisasi pada bidang pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada

tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkanlah suatu hal yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Atas prinsip tersebut maka desentralisasi pendidikan adalah suatu model dalam hal pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Berbagai teori dan cara dilakukan untuk dapat memenuhi amanat pembukaan UUD'45. yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, agar manusia Indonesia menjadi manusia yang berkarakter. Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan muansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang hotistik sebagai bangsa. Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Memperhatikan situasi dan kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan tersebut, pemerintah mengambil inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama pembangunan nasional. Artinya, setiap upaya pembangunan harus selalu dipikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter. Pembangunan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata dalam bentuk aksi nasional dalam rangka

memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa sebagai upaya untuk menjaga jati diri bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam naungan NKRI. Pembangunan karakter bangsa harus dilakukan melalui pendekatan sistematis dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat termasuk teman sebaya, generasi muda, lanjut usia, media massa, pramuka, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok strategis seperti elite struktural, elite politik, wartawan, budayawan, agamawan, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Adapun strategi pembangunan karakter dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat serta pendekatan multidisiplin yang tidak menekankan pada indoktrinasi.

B. Saran

1. Mengacu pada simpulan maka disarankan agar Pemerintah Pusat bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha dan dunia industri dalam menyelenggarakan program-program pendidikan antara lain: menetapkan pembangunan manusia melalui pendidikan sebagai strategi pembangunan jangka panjang dengan sasaran pokok pada, menjadikan pembangunan manusia sebagai ujung tombak pembangunan berkelanjutan, menjadikan pendidikan sebagai kunci utama pembangunan manusia, menuntaskan wajib belajar nasional 9 tahun dan 12 tahun, meningkatkan komitmen Pemerintah untuk berinvestasi pada pendidikan sebagai solusi

masa depan bangsa, dengan segera mewujudkan komitmen anggaran 20% APBN untuk pendidikan, di luar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru/PNS.

2. Meningkatkan sumberdaya pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi, sikap mental, dan etika profesi, meningkatkan mutu dan kompetensi guru serta mutu pendidikan guru dan meningkatkan sarana-prasarana pendidikan, meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan berorientasi pada meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan bermutu dan mengubah orientasi gelar menjadi orientasi kompetensi, kecakapan, kecerdasan dan keluhuran budi, meningkatkan apresiasi pada guru dan tenaga pendidik, dan melakukan jejaring kerja dan sinergi dengan sekolah kejuruan dalam upaya sinkronisasi penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja;
3. Dalam rangka meningkatkan pembangunan karakter yang berhasil guna, diperlukan upaya-upaya nyata antara lain penyusunan desain pembangunan karakter secara nasional, penyusunan rencana aksi nasional secara terpadu, pencanangan pembangunan karakter bangsa. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Pusat terutama Presiden dan DPR membuat suatu undang-undang tentang pembangunan karakter bangsa, yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk semua pihak terkait melakukan pembangunan karakter dengan mengaktualisasikan nilai-nilai karakter secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat penting karena pembangunan

karakter bangsa diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.